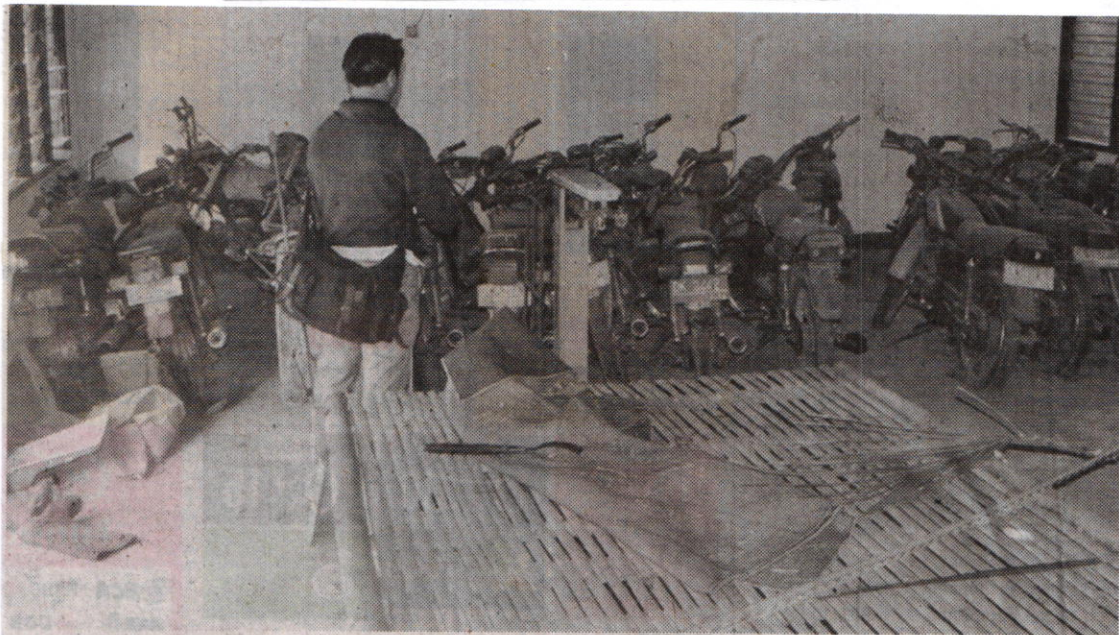




32 Motor Milik Pemprov Jadi Rongsokan



TAK DIPAKAI - Sepeda motor milik Pemprov Bali yang sudah tidak dipakai di Kantor UPT Dinas Pertanian Klungkung. Bali Post/kmb

Semarang (Bali Post) -

Aset Pemprov Bali di Klungkung banyak yang tidak terurus. Seperti di Kantor UPT Dinas Pertanian Klungkung, 32 sepeda motor milik Pemprov Bali disimpan di gudang setempat. Motor tersebut kini sudah tidak layak pakai, bahkan beberapa di antaranya sudah menjadi barang rongsokan.

Kasubag Penghapusan Aset Bagian Perlengkapan Klungkung A.A. Raka Sarjana mengakui hal itu. Menurutnya, aset milik pemprov tersebut sedang dalam proses pengajuan pemindahtanganan. Semua kendaraan yang sebelumnya dipakai penyuluh pertanian ini, kondisinya sudah tidak layak pakai karena umurnya sudah lebih dari 10 tahun. "Karena ada di Kabupaten Klungkung, maka nanti akan dimohonkan ke Pemprov Bali agar bisa dipindahtangankan," katanya, Senin (7/12) kemarin.

Setelah dimohonkan, pihaknya akan menunggu sampai aset tersebut menjadi milik Pemkab Klungkung. Setelah menjadi milik pemkab, maka barulah dilakukan proses lelang. Tetapi sebelum dilelang, dilakukan penaksiran harga terlebih dahulu, apakah dibidang rongsokan atau masih bisa dipakai.

Pembek Klungkung dalam waktu dekat juga akan melakukan proses lelang sembilan unit kendaraan dinas. Tiga di antaranya bekas dipakai pimpinan DPRD Klungkung. Semua kendaraan dinas tersebut kini berada di garasi halaman belakang Kantor Bupati Klungkung.

Sebenarnya ada 11 kendaraan yang akan dilelang Pemkab Klungkung, namun dua unit dokumennya atau surat-suratnya tidak ditemukan. Dengan begitu, Pemkab hanya melakukan proses lelang terhadap sembilan kendaraan dinas. (kmb)

Edisi : Selasa, 8 Desember 2015

Hal : 10



Pembinaan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Bali Bidik Delapan SKPD

Singaraja (Bali Post) -

Dalam satu pekan ke depan petugas Inspektorat Provinsi Bali melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan pemerintah di Kabupaten Buleleng. Delapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Buleleng dibidik atau dijadikan sampel dalam pengawasan di pengu-
jung tahun ini.

Rombongan pengawas dari Inspektorat Provinsi Bali tiba di Buleleng sekitar pukul 11.00 wita. Rombongan yang dipimpin Kepala Inspektorat Provinsi Bali I Ketut Teneng itu diterima Sekkab Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P., di lobi kantor bupati.

Dalam pertemuan singkat ini, petugas pengawas dari Inspektorat Provinsi Bali menyampaikan maksud dan teknis pengawasan yang akan dilakukan dalam satu pekan ke depan. Delapan SKPD yang menjadi sampel penga-
wasan masing-masing Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD), Badan Polisi Pamong Praja (Pol. PP), dan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), serta Dinas Kesehatan (Dinkes) Buleleng.

Ketut Teneng usai pertemuan mengatakan, penga-
wasan dengan sistem sampel ini dilakukan sebagai kegiatan rutin yang dilaku-

kan menyasar kabupaten/kota di Bali. Pengawasan ini sebenarnya tidak mencari kesalahan SKPD, namun dijadikan bahan evaluasi terhadap kinerja SKPD dalam mempertanggungjawabkan keuangan pemerintah dalam satu tahun mengikuti regulasi yang ada. Melihat dari prestasi Buleleng yang telah berhasil merebut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pelaksanaan APBD yang lalu, Teneng meyakini pertanggungjawaban keuangan di daerah ini sudah sangat baik mengikuti regulasi yang ada. Keberhasilan ini diharapkan mengimbas ke kabupaten yang belum merebut WTP seperti Kelungkung, Bangli, dan Kabupaten Karangasem. "Bukan mengawasi lalu mencari kesalahan tetapi kami ke sini melakukan pembinaan. Buleleng sudah sangat bagus dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya dan sudah merebut WTP," tegasnya.

Sementara itu, Sekkab Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P., mengatakan, kehadiran Inspektorat Provinsi Bali ke Buleleng tidak bisa dipandang bahwa pengelolaan keuangan yang sudah dilakukan itu terjadi permasalahan. Namun, pembinaan ini menjadi kesempatan bagi SKPD di daerahnya untuk melakukan evaluasi dalam mengikuti regulasi untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang sudah dianggarkan dalam satu tahun. (kmb38)



Proyek Gedung Radiologi Terancam Molor



BELUM TUNTAS - Para pekerja berusaha menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum tuntas di proyek Gedung Radiologi RSUD Klungkung, Senin (7/12) kemarin.



Dirut RSUD Siapkan Sanksi

Semarapura (Bali Post) -

Proyek Gedung Radiologi RSUD Klungkung terancam molor. Pasalnya, hingga Senin (7/12) kemarin, pengerjaan yang seharusnya selesai 9 Desember besok, belum juga tuntas. Para pekerja proyek yang dikerjakan PT Megatama Karya dengan konsultan pengawas PT Bikarma ini masih menyelesaikan *finishing* di lantai dua.

Pantauan wartawan *Bali Post*, Senin kemarin, sejumlah pekerja masih bekerja menyelesaikan tahap akhir yang belum kelar di lantai satu. Sementara di lantai dua, pekerja masih menyelesaikan tembok ruangan. Bahkan, lantai ruangan belum dikerjakan. Sejumlah petugas yang sedang memasang vinil di tembok ruangan, mengaku berusaha menyelesaikan pengerjaan yang belum kelar. Mereka mengejar perjanjian batas waktu pengerjaan yang tinggal menghitung hari.

Gedung Radiologi berlantai dua seluas 14,2 x 30,2 meter ini dikerjakan selama 190 hari mulai 3 Juni hingga 9 Desember dengan nilai proyek mencapai Rp 6,750 miliar. Dirut RSUD Klungkung I Nyoman Kesuma mengungkapkan, dari hasil evaluasi ada optimisme yang disampaikan untuk menyelesaikan proyek gedung. Namun, bila tidak bisa diselesaikan hingga batas waktu

yang ditentukan, pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku seperti pemberian sanksi.

Walaupun batas waktu pengerjaan tinggal sehari, tidak ada permintaan perpanjangan batas waktu pengerjaan dari rekanan. "Meski mengajukan perpanjangan waktu, denda juga tetap diberlakukan bila tidak dapat menyelesaikan pengerjaan sesuai dengan kontrak yang telah ditentukan," tuturnya saat diminta konfirmasi lewat telepon.

Permasalahan juga menghambat proyek pengadaan mesin pendingin di ruangan. Mesin pendingin yang sempat gagal tender ini kini telah mendapatkan pemenang. Hanya, batas waktu pemasangan sangat mepet karena keterbatasan waktu. Untuk itu, sebelum tender dimulai, pihaknya telah memohon untuk perpanjangan batas waktu pengerjaan yang diperlukan, sekitar 10 hari sesuai dengan hitun-

gan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Klungkung. "Sesuai hitungan, pengerjaan akan lewat dari 15 Desember. Makanya kami mengajukan surat permohonan perpanjangan ke Pak Sekda dan disetujui. Batas pengerjaan hingga 25 Desember," bebernya.

Gedung Radiologi ini ditargetkan bisa beroperasi tahun 2016. Soalnya, tahun depan akan diadakan pengerjaan *central sterile supply department (CSSD)* di kamar operasi saat ini. Kamar operasi akan dipindahkan ke lantai dua Gedung

Radiologi yang dikerjakan sekarang, sedangkan lantai satu Gedung Radiologi akan dioperasikan sebagai ruang radiologi. "Tahun depan gedung itu harus beroperasi. Kalau tidak begitu, perencanaan lain tidak bisa jalan," ungkap Kesuma. (dwa)

Edisi : Selasa, 8 Desember 2015

Hal : 10